

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

**Bab I
Pendahuluan**

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

1.1.1. Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama periode pelaporan tahun 2022; dan
- b. Mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi apakah cara memperoleh pendapatan dan alokasinya telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD serta hasil-hasil yang dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi serta kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

BAB III PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal non keuangan yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, meliputi letak geografis, luas wilayah, penduduk dan informasi relevan lainnya.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan perkembangannya dibanding Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	18.177.551.960,00	17.729.625.778,00	97,54
Surplus (defisit)	(18.177.551.960,00)	(17.729.625.778,00)	97,54

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Uraian	2021	2022	%
PENDAPATAN	0,00	0,00	-
BELANJA	15.647.417.848,52	17.729.625.778,00	13,31
Surplus (defisit)	(15.647.417.848,52)	(17.729.625.778,00)	13,31

Realisasi Pendapatan SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target sebesar Rp 0,00 naik 0,00% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 17.729.625.778,00 atau 97,54% dari target sebesar Rp 18.177.551.960,00 naik 13,31% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 15.647.417.848,52.

2.1.1 Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pajak Daerah mempunyai kontribusi sebesar 0,00%, Retribusi Daerah sebesar 0,00%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 0,00% serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar 0,00%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 meningkat sebesar 0,00% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,00. Gambaran lebih lengkap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 2.4 Perkembangan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Uraian	2021	2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00
	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00

2.1.2 Belanja

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Belanja Operasi terhadap Belanja sebesar 83,05%. Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.670.792.295,00 meningkat sebesar 12,68% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 13.397.624.142,51.

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi Belanja Modal terhadap Belanja sebesar 16,95%. Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.058.833.483,00 atau sebesar 16,83% dari Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 18.177.551.960,00 meningkat sebesar 35,96% dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.249.793.706,01. Gambaran lebih lengkap realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Belanja Operasi	15.096.719.277,00	14.670.792.295,00	97,18	83,05
	Belanja Pegawai	8.638.698.000,00	8.224.521.514,00	95,21	47,52
	Belanja Barang dan Jasa	6.458.021.277,00	6.446.270.781,00	99,82	35,53
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2	Belanja Modal	3.080.832.683,00	3.058.833.483,00	99,29	16,95
	Belanja Tanah	-	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	427.897.000,00	409.787.750,00	95,77	2,35
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.671.261.200,00	1.668.026.692,00	99,81	9,19
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan I	981.674.483,00	981.019.041,00	99,93	5,40
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	18.177.551.960,00	17.729.625.778,00	97,54	100,00

Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	Belanja Operasi	13.397.624.142,51	14.670.792.295,00	19,15
	Belanja Pegawai	7.546.054.240,00	8.224.521.514,00	8,99
	Belanja Barang dan Jasa	5.851.569.902,51	6.446.270.781,00	10,16
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2	Belanja Modal	2.249.793.706,01	3.058.833.483,00	882,60
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	88.756.500,00	409.787.750,00	361,70
	Belanja Gedung dan Bangunan	249.113.000,00	1.668.026.692,00	569,59
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan I	1.911.924.206,01	981.019.041,00	(48,69)
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah Belanja	15.647.417.848,52	17.729.625.778,00	13,31

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Proporsi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.497.640.621,00	11.062.820.245,00	96,22	63,25
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00	100,00	0,09
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00	0,03
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,02
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,04
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.682.182.944,00	8.268.006.438,00	95,23	47,76
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.638.698.000,00	8.224.521.514,00	95,21	47,52
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan	42.284.944,00	42.284.924,00	100,00	0,23
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00

	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	441.077.885,00	441.077.685,00	100,00	2,43
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	0,10
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.370.885,00	199.370.885,00	100,00	1,10
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.412.000,00	52.412.000,00	100,00	0,29
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.995.000,00	170.994.800,00	100,00	0,94
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261.097.000,00	245.300.000,00	93,95	1,44
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	261.097.000,00	245.300.000,00	93,95	1,44
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.464.654.960,00	1.462.460.522,00	99,85	8,06
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	89.469.960,00	89.469.872,00	100,0	0,49
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.240.000,00	123.086.158,00	99,88	0,68
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1.251.945.000,00	1.249.904.492,00	99,84	6,89
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.827.832,00	630.175.600,00	99,58	3,48
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.774.000,00	137.949.200,00	98,69	0,77
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	14.050.000,00	14.050.000,00	100,00	0,08
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.950.000,00	50.950.000,00	100,00	0,28
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	428.053.832,00	427.226.400,00	99,81	2,35
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	873.730.940,00	872.763.486,00	99,89	4,81
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	309.008.000,00	309.005.466,00	100,00	1,70
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	309.008.000,00	309.005.466,00	100,00	1,70
2.2	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	263.230.500,00	262.294.900,00	99,64	1,45
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	263.230.500,00	262.294.900,00	99,64	1,45
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	301.492.440,00	301.463.120,00	99,99	1,66
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,02
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan	49.065.440,00	49.064.120,00	100,00	0,27
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	249.427.000,00	249.399.000,00	99,99	1,37
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.646.620.899,00	5.634.618.547,00	99,79	31,06
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.646.620.899,00	5.634.618.547,00	99,79	31,06
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.673.571.083,00	2.667.586.543,00	99,78	14,71
	- Kelurahan Semaki	291.529.000,00	291.529.000,00	100,00	1,60
	- Kelurahan Muja Muju	297.361.000,00	297.261.000,00	99,97	1,64
	- Kelurahan Tahunan	398.208.000,00	398.081.000,00	99,97	2,19
	- Kelurahan Warungboto	438.209.000,00	432.452.910,00	98,69	2,41
	- Kelurahan Pandeyan	629.953.483,00	629.953.483,00	100,00	3,47
	- Kelurahan Sorosutan	274.406.600,00	274.406.600,00	100,00	1,51
	- Kelurahan Giwangan	343.904.000,00	343.902.550,00	100,00	1,89

	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.973.049.816,00	2.967.032.004,00	99,80	16,36
	- Kelurahan Semaki	222.909.440,00	222.815.172,00	99,96	1,23
	- Kelurahan Muja Muju	415.784.564,00	414.749.024,00	99,75	2,29
	- Kelurahan Tahunan	481.258.892,00	481.155.477,00	99,98	2,65
	- Kelurahan Warungboto	265.575.480,00	264.774.172,00	99,70	1,46
	- Kelurahan Pandeyan	403.946.000,00	403.936.603,00	100,00	2,22
	- Kelurahan Sorosutan	614.261.560,00	611.525.984,00	99,55	3,38
	- Kelurahan Giwangan	569.313.880,00	568.075.572,00	99,78	3,13
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	159.559.500,00	159.423.500,00	99,91	0,88
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.260.000,00	52.260.000,00	100,00	0,29
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	52.260.000,00	52.260.000,00	100,00	0,29
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	107.299.500,00	107.163.500,00	99,87	0,59
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	107.299.500,00	107.163.500,00	99,87	0,59
	Jumlah Belanja	18.177.551.960,00	17.729.625.778,00	97,54	100,00

Tabel 2.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Uraian	2021	2022	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.665.144.259,31	11.062.820.245,00	14,46
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	6.000.000,00	15.800.000,00	163,33
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.400.000,00	4.600.000,00	91,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.600.000,00	7.200.000,00	350,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.588.455.286,50	8.268.006.438,00	8,96
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.546.054.240,00	8.224.521.514,00	8,99
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.601.046,50	42.284.924,00	1,64
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	400.000,00	800.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	400.000,00	400.000,00	-
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	344.891.888,96	441.077.685,00	27,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	5.977.600,00	18.300.000,00	206,14
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.150.288,96	199.370.885,00	16,49
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.594.000,00	52.412.000,00	60,80
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.170.000,00	170.994.800,00	26,50
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.820.000,00	245.300.000,00	192,65
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	83.820.000,00	245.300.000,00	192,65
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	517.776.279,71	1.462.460.522,00	182,45
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.966.632,90	89.469.872,00	7,84
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	103.538.681,00	123.086.158,00	18,88
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	331.270.965,81	1.249.904.492,00	277,31
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.124.200.804,14	630.175.600,00	(43,94)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.696.300,00	137.949.200,00	75,29

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	0,00	14.050.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.800.000,00	50.950.000,00	83,27
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.017.704.504,14	427.226.400,00	(58,02)
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	740.386.154,80	872.763.486,00	17,88
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	397.849.300,00	309.005.466,00	(22,33)
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	397.849.300,00	309.005.466,00	(22,33)
2.2	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	184.201.750,00	262.294.900,00	42,40
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	184.201.750,00	262.294.900,00	42,40
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	158.335.104,80	301.463.120,00	90,40
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	54.912.604,80	3.000.000,00	(94,54)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan	10.385.750,00	49.064.120,00	372,42
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	93.036.750,00	249.399.000,00	168,07
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.048.187.434,41	5.634.618.547,00	11,62
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.048.187.434,41	5.634.618.547,00	11,62
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.380.819.706,01	2.667.586.543,00	12,04
	- Kelurahan Semaki	363.237.000,00	291.529.000,00	(19,74)
	- Kelurahan Muja Muju	357.386.000,00	297.261.000,00	(16,82)
	- Kelurahan Tahunan	180.242.000,00	398.081.000,00	120,86
	- Kelurahan Warungboto	525.874.615,11	432.452.910,00	(17,77)
	- Kelurahan Pandeyan	434.807.190,90	629.953.483,00	44,88
	- Kelurahan Sorosutan	404.307.900,00	274.406.600,00	(32,13)
	- Kelurahan Giwangan	114.965.000,00	343.902.550,00	199,14
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.667.367.728,40	2.967.032.004,00	11,23
	- Kelurahan Semaki	273.269.449,20	222.815.172,00	(18,46)
	- Kelurahan Muja Muju	407.499.360,00	414.749.024,00	1,78
	- Kelurahan Tahunan	483.447.698,00	481.155.477,00	(0,47)
	- Kelurahan Warungboto	301.413.046,00	264.774.172,00	(12,16)
	- Kelurahan Pandeyan	227.171.559,40	403.936.603,00	77,81
	- Kelurahan Sorosutan	442.081.800,00	611.525.984,00	38,33
	- Kelurahan Giwangan	532.484.815,80	568.075.572,00	6,68
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	193.700.000,00	159.423.500,00	(17,70)
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	163.200.000,00	52.260.000,00	(67,98)
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	163.200.000,00	52.260.000,00	(67,98)
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.500.000,00	107.163.500,00	251,36
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	30.500.000,00	107.163.500,00	251,36
	Jumlah Belanja	15.647.417.848,52	17.729.625.778,00	13,31

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya terdapat hambatan yakni faktor ketersediaan stok barang yang dimiliki oleh penyedia dan anjuran untuk memilih barang yang ber-TKDN dimana tidak setiap penyedia mampu memenuhi syarat tersebut sehingga dalam melakukan proses pemilihan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pelaksanaan Pekerjaan fisik harus mempertimbangkan kewenangan kementren/kelurahan agar tidak berbenturan dengan kewenangan instansi terkait, adanya pekerjaan yang membutuhkan kajian dari instansi terkait, serta terkait kedudukan alas hak (tanah Pemeritah Kota Yogyakarta) merupakan suatu kendala sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik menjadi tertunda.

Bab III
Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

3. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1	Pendapatan - LRA	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	Pajak Daerah	0	0
	Retribusi Daerah	0	0
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
	Lain-lain PAD yang Sah	0	0

Penjelasan :

Realisasi pendapatan per Rincian objek Pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp 0,00. Tidak ada realisasi pendapatan karena SKPD tidak memiliki objek pendapatan daerah.

3.2	Belanja	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	BELANJA DAERAH	17.729.625.778,00	15.647.417.848,52
	BELANJA OPERASI	14.670.792.295,00	13.397.624.142,51
	Belanja Pegawai	8.224.521.514,00	7.546.054.240,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.664.573,00	3.875.929.884,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.205.856.941,00	3.670.124.356,00
	Belanja Barang dan jasa	6.446.270.781,00	5.851.569.902,51
	Belanja Barang	2.543.784.251,00	2.297.694.675,96
	Belanja Jasa	3.372.647.070,00	2.961.211.722,41
	Belanja Pemeliharaan	412.989.460,00	465.663.504,14
	Belanja Perjalanan Dinas	106.350.000,00	112.000.000,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat	10.500.000,00	15.000.000,00
	BELANJA MODAL	3.058.833.483,00	2.249.793.706,01
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.787.750,00	88.756.500,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	3.000.000,00	-
	Belanja Modal Alat Bengkel dan alat ukur	6.800.000,00	-
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.850.000,00	4.936.500,00
	Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	143.987.750,00	24.000.000,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.300.000,00	-
	Belanja Modal Komputer	173.850.000,00	59.820.000,00
	Belanja Modal Rambu-Rambu	14.000.000,00	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.668.026.692,00	249.113.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.165.862.066,00	24.765.000,00
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	502.164.626,00	224.348.000,00
	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	981.019.041,00	1.911.924.206,01
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	515.906.483,00	1.453.179.406,01
	Belanja Modal Bangunan Air	465.112.558,00	458.744.800,00

Penjelasan :

Realisasi belanja pada tahun 2022 mayoritas mengalami kenaikan daripada realisasi belanja tahun 2021. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 142.734.689,00 atau sebesar 3,68% dari realisasi tahun 2021. Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 535.732.585,00 atau sebesar 14,60% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Barang tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 246.089.575,04 atau sebesar 10,71% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Jasa naik sebesar Rp. 411.435.347,59 atau sebesar 13,89% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Modal Alat Angkutan naik sebesar Rp. 3.000.000,00; Belanja Alat Bengkel/alat ukur naik sebesar Rp. 6.800.000,00; Belanja Modal alat kedokteran/kesehatan naik sebesar Rp. 2.300.000,00; dan Belanja Modal Rambu-rambu naik sebesar Rp. 14.000.000,00, keempat belanja ini naik 100% dari realisasi tahun 2021.

Belanja Modal Alat Kantor/Rumah tangga naik sebesar Rp. 60.913.500,00 atau sebesar 1.233,94% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Modal Alat Studio Komunikasi dan Pemancar naik sebesar Rp. 119.987.750,00 atau sebesar 499,95% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Modal Komputer naik sebesar Rp. 114.030.000,00 atau sebesar 190,62% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Modal Bangunan Gedung naik sebesar Rp. 1.141.097.066,00 atau sebesar 4607,70% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti naik sebesar Rp. 277.816.626,00 atau sebesar 123,83% dari realisasi tahun 2021. Belanja Modal Bangunan Air naik sebesar Rp. 6.367.758,00 atau sebesar 1,39% dari realisasi belanja tahun 2021.

Realisasi belanja tahun 2022 yang mengalami penurunan dari tahun 2021 diantaranya belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat, dan Belanja Modal Jalan dan Jembatan. Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan terutama untuk pekerjaan fisik pemeliharaan yang dilakukan penyesuaian/pengalihan ke rekening Belanja Modal. Untuk Belanja Modal Jalan dan Jembatan mengalami penurunan realisasi dikarenakan terkendala alas hak yakni wajib di tanah pemerintah kota sehingga banyak yang dialihkan untuk kegiatan lainnya.

Belanja Pemeliharaan turun sebesar Rp. 52.674.044,14 atau sebesar 11,31% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Perjalanan Dinas turun sebesar Rp. 5.650.000,00 atau sebesar 5,04% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ masyarakat turun sebesar Rp. 4.500.000,00 atau sebesar 30% dari realisasi belanja tahun 2021. Belanja Modal dan Jembatan turun sebesar Rp. 937.272.923,01 atau sebesar 64,50% dari realisasi belanja tahun 2021.

3.3 Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Pendapatan- LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
Beban Pajak Daerah	0	0
Beban Retribusi Daerah	0	0
Beban Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
Beban Lain-lain PAD yang Sah	0	0

Penjelasan :

Pendapatan-LO per Rincian objek Pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp 0,00. Tidak ada Pendapatan-LO karena SKPD tidak memiliki objek pendapatan daerah.

3.4 Beban	Jumlah Beban-LO Per 31 Desember 2022 (Rp)	Jumlah Beban- LO Per 31 Desember 2021 (Rp)
BEBAN DAERAH		
BEBAN OPERASI	14.634.627.011,00	13.407.976.418,51
Beban Pegawai	8.224.521.514,00	7.546.054.240,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	4.018.664.573,00	3.875.929.884,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.205.856.941,00	3.670.124.356,00
Beban Barang dan jasa	6.410.105.497,00	5.861.922.178,51
Beban Barang	2.546.746.178,00	2.307.853.302,96
Beban Jasa	3.374.679.753,00	2.961.405.371,41
Beban Pemeliharaan	371.829.566,00	465.663.504,14
Beban Perjalanan Dinas	106.350.000,00	112.000.000,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat	10.500.000,00	15.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.186.632.894,65	572.742.051,99
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	352.279.344,07	188.996.774,53
Beban Penyusutan alat Besar	3.890.353,65	1.608.589,42
Beban Penyusutan alat angkutan	60.173.536,02	30.805.945,54
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan alat ukur	3.340.000,00	1.215.000,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	2.750.000,00	-
Beban Penyusutan Alat Kantor dan rumah tangga	181.161.849,40	97.812.273,76
Beban Penyusutan Alat Studio, Komuniiasi, dan Pemancar	12.505.897,50	8.608.535,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.440.000,00	1.142.500,00
Beban Penyusutan alat Laboratorium	3.374.250,00	1.799.600,00
Beban Penyusutan Komputer	82.643.457,50	38.571.497,50
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	7.432.833,31
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	436.740.102,59	178.835.540,76
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	414.063.444,94	171.022.744,13
Beban Penyusutan Monumen	3.432.076,36	358.238,18
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	19.244.581,29	7.454.558,45
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	397.613.447,99	204.909.736,70
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	372.190.325,93	194.564.457,72
Beban Penyusutan Bangunan Air	25.423.122,06	10.345.278,98
JUMLAH BEBAN	15.821.259.905,65	13.980.718.470,50
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.821.259.905,65)	(13.980.718.470,50)

Penjelasan realisasi :

Beban pada tahun 2022 mayoritas mengalami kenaikan daripada tahun 2021 selaras dengan kenaikan realisasi belanja tahun 2022. Beban Pegawai naik sebesar Rp. 678.467.274,00 atau sebesar 8,99% dari tahun 2021. Beban Pegawai terdiri dari: Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 142.734.689,00 atau sebesar 3,68% dari tahun 2021; dan Beban Tambahan Penghasilan ASN mengalami kenaikan sebesar Rp. 535.732.585,00 atau sebesar 14,60% dari tahun 2021. Beban Barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 548.183.318,49 atau sebesar 9,35%. Beban Barang dan jasa terdiri dari: Beban Barang yang naik sebesar Rp. 238.892.875,04 atau sebesar 10,35%; Beban jasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 413.274.381,59 atau sebesar 13,96%; Beban Pemeliharaan turun sebesar Rp. 93.833.938,14 atau sebesar 20,15%; Beban Perjalanan Dinas turun sebesar Rp. 5.650.000,00 atau sebesar 5,04% dan Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat turun sebesar Rp. 4.500.000,00 atau sebesar 30,00% dari tahun 2021.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 613.890.842,66 atau sebesar 107,18% dari tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp. 163.282.569,54 atau sebesar 86,39%. Beban Penyusutan Peralatan dan mesin terdiri dari Beban Penyusutan Alat Besar yang naik sebesar Rp. 2.281.764,23 atau 141,85% dari tahun 2021; Beban Penyusutan Alat Angkutan naik sebesar Rp. 29.367.590,48 atau sebesar 95,33% dari tahun 2021; Beban Penyusutan alat Bengkel dan Alat Ukur naik sebesar Rp. 2.125.000,00 atau sebesar 174,90% dari tahun 2021; Beban Penyusutan alat Pertanian naik sebesar Rp. 2.750.000,00 atau sebesar 100% dari tahun 2021; Beban Penyusutan Alat kantor dan rumah tanggaa naik sebesar Rp. 83.349.575,64 atau sebesar 85,21% dari tahun 2021; Beban alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar naik sebesar Rp. 3.897.362,50 atau sebesar 45,27% dari tahun 2021; Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan kesehatan naik sebesar Rp. 1.297.500,00 atau sebesar 113,57% dari tahun 2021; Beban Penyusutan Alat Laboratorium naik sebesar Rp. 1.574.650,00 atau sebesar 87,50% dari tahun 2021; Beban Penyusutan Komputer naik sebesar Rp. 44.071.960,00 atau 114,26% dari tahun 2021; dan Beban Penyusutan Peralatan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp. 7.432.833,31 atau sebesar 100% daari tahun 2021.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp. 257.904.561,83 atau sebesar 144,21% dari tahun 2021. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terdiri dari Beban Penyusutan Bangunan Gedung yang naik sebesar Rp. 243.040.700,81 atau sebesar 142,11% dari tahun 2021; Beban Penyusutan Monumen naik sebesar Rp. 3.073.838,18 atau sebesar 858,04% dari tahun 2021; dan Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti naik sebesar Rp. 11.790.022,84 atau sebesar 158,16% dari tahun 2021.

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 192.703.711,29 atau sebesar 94,04% dari tahun 2021. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan yang naik sebesar Rp. 177.625.868,21 atau sebesar 91,29% dari tahun 2021; dan Beban Penyusutan Bangunan Air naik sebesar Rp. 15.077.843,08 atau sebesar 145,75% dari tahun 2021.

3.5

Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tetap	36.926.423.932,81	33.784.984.391,53
Tanah	4.441.041.000,00	4.441.041.000,00
Tanah	4.441.041.000,00	4.441.041.000,00
Peralatan Dan Mesin	4.440.470.880,25	3.614.708.043,67
Alat Besar	61.382.508,84	47.870.251,84
Alat Angkutan	781.831.660,75	656.372.424,95
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	33.400.000,00	24.300.000,00
Alat Pertanian	12.500.000,00	-
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	2.240.279.440,68	1.772.662.096,90
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	174.197.892,72	169.897.892,72
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	14.275.000,00	11.425.000,00
Alat Laboratorium	35.992.000,00	35.992.000,00
Komputer	936.478.161,68	746.054.161,68
Alat Keselamatan Kerja	47.550.000,00	47.550.000,00
Rambu - Rambu	51.009.215,58	51.009.215,58
Peralatan Olah Raga	51.575.000,00	51.575.000,00
Gedung Dan Bangunan	22.042.747.317,02	20.916.793.600,53
Bangunan Gedung	20.703.497.200,51	20.135.513.937,39
Monumen	171.603.817,48	35.823.817,48
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.167.646.299,03	745.455.845,66
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	5.908.634.438,73	4.718.911.450,52
Jalan Dan Jembatan	4.607.920.451,49	3.891.289.158,04
Bangunan Air	1.300.713.987,24	827.622.292,48
Aset Tetap Lainnya	93.530.296,81	93.530.296,81
Bahan Perpustakaan	36.163.296,81	36.163.296,81
Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	57.355.000,00	57.355.000,00
Tanaman	12.000,00	12.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Aset Tetap	36.926.423.932,81	33.784.984.391,53

Penjelasan :

Penambahan Aset dari kelompok Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp. 825.762.836,58 atau sebesar 22,84% dari tahun 2021, terdiri dari: Alat Besar naik sebesar Rp. 13.512.257,00 atau sebesar 28,23% dari tahun 2021; Alat Angkutan naik sebesar Rp. 125.459.235,80 atau sebesar 19,11% dari tahun 2021; Alat Bengkel dan alat ukur naik sebesar Rp. 9.100.000,00 atau sebesar 37,45% dari tahun 2021; Alat pertanian naik sebesar Rp. 12.500.000,00 atau sebesar 100% dari tahun 2021; Alat Kantor dan Rumah Tangga naik sebesar Rp. 467.617.343,78 atau sebesar 26,38% dari tahun 2021; Alat studio, Komunikasi dan Pemancar naik sebesar Rp. 4.300.000,00 atau sebesar 2,53%; Alat Kedokteran dan Kesehatan naik sebesar Rp. 2.850.000,00 atau sebesar 24,95% dari tahun 2021; dan Komputer naik sebesar Rp. 190.424.000,00 atau sebesar 25,52%.

Penambahan Aset dari Kelompok Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp. 1.125.953.716,49 atau sebesar 5,38% dari tahun 2021, terdiri dari Bangunan Gedung naik sebesar Rp. 567.983.263,12 atau sebesar 2,82%; Monumen naik sebesar Rp. 135.780.000,00 atau sebesar 379,02% dari tahun 2021; dan Tugu Titik Kontrol/Pasti naik sebesar Rp. 422.190.453,37 atau sebesar 56,64%. sedangkan dari kelompok Jalan, jaringan dan Irigasi naik sebesar Rp. 1.18.722.988,21 atau sebesar 25,21%, terdiri dari Jalan dan Jembatan naik sebesar Rp. 716.631.293,45 atau sebesar 18,42% dari tahun 2021 dan Bangunan air naik sebesar Rp. 473.091.694,76 atau naik sebesar 57,16% dari tahun 2021.

3.6 Kewajiban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	392.571,00	347.285,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	109.100,00	-
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	8.646.511,00	6.768.214,00
Total	9.148.182,00	7.115.499,00

Penjelasan :

Utang Belanja tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.032.683,00 atau sebesar 28,57%, yang terdiri dari Tagihan Telepon naik sebesar Rp. 45.286,00 atau sebesar 13,04% dari tahun 2021; Tagihan Air naik Rp. 109.100,00 atau sebesar 100% dari tahun 2021; dan Tagihan Listrik naik sebesar Rp. 1.879.297,00 atau sebesar 27,75% dari tahun 2021.

3.7 Ekuitas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas Awal	27.660.727.772,25	27.660.727.772,25
RK PPKD	17.729.625.778,00	0,00
Surplus/Defisit-LO	(15.821.259.905,65)	0,00
Ekuitas Mutasi Aset Tetap	34.996.164,28	0,00
Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan	570.703.178,62	0,00
Ekuitas Mutasi Aset Lainnya	(153.537.001,55)	0,00
Ekuitas Akhir	30.021.255.985,95	27.660.727.772,25

Penjelasan :

Ekuitas selama tahun 2022 mengalami penambahan senilai Rp. 2.360.528.213,70 atau naik sebesar 8,53% dari tahun 2021. Penambahan tersebut berasal dari Realisasi belanja (RK PPKD) senilai Rp. 17.729.625.778,00; Ekuitas Mutasi Aset Tetap senilai Rp. 34.996.164,28; dan Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan senilai Rp. 570.703.178,62. Sedangkan pengurangan Ekuitas berasal dari Surplus/Defisit-LO senilai Rp. 15.821.259.905,65; dan Ekuitas Mutasi Aset Lainnya senilai Rp. 153.537.001,55.

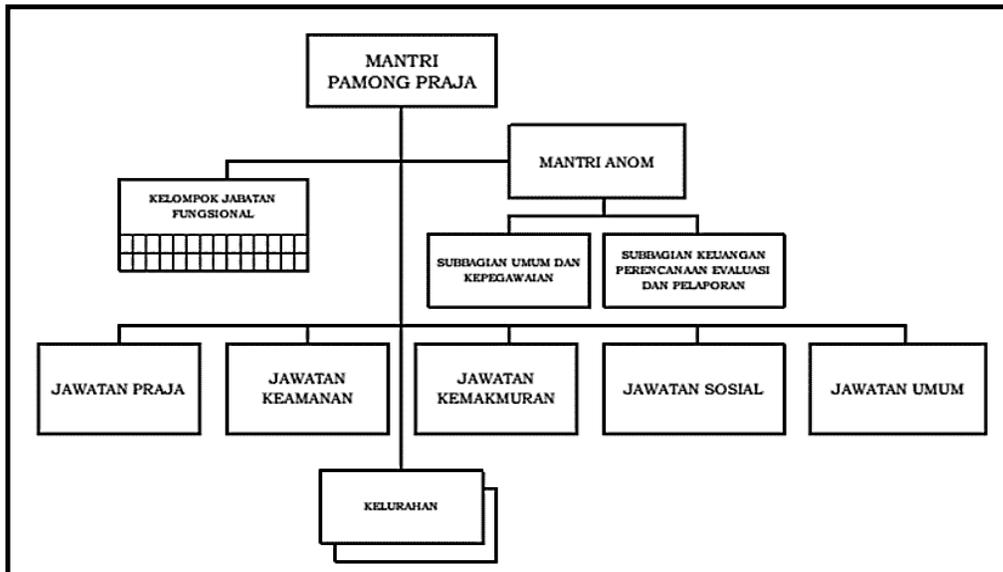
Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perwal No. 62 Tahun 2016 dan perubahan Perwal No 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta yang berkedudukan :

1. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kota Yogyakarta
2. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Mantri Anom adalah sekretaris pada Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta



Susunan Organisasi Kemantren (Perwal Kota Yogyakarta No. 121 tahun 2020)

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kemantren menurut Peraturan Walikota Yogyakarta No 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan. Kemantren berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja.

Kemantren mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kemantren mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Bab V

Penutup

Dari uraian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 pada bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target Rp 0,00 yang terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target;
- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target;
- 4) Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target.

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 17.729.625.778,00 atau 97,54% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

5.1.2.a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp 14.670.792.295,00 atau sebesar 97,18% dari anggaran. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 8.638.698.000,00 terealisasi sebesar Rp 8.224.521.514,00 atau 95,21% dari anggaran. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 6.458.021.277,00 terealisasi sebesar Rp 6.446.270.781,00 atau sebesar 99,82% dari anggaran.

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp 0,00 terealisasi Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran. Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran.

5.1.2.b. Belanja Modal

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 3.058.833.483,00 atau 99,29% dari anggaran.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Lainnya.

5.2 Neraca

5.2.1 Aset

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp 30.030.404.167,95 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.410.531,00, Aset Tetap sebesar Rp 30.028.993.936,95 dan Aset Lainnya sebesar Rp 0,00.

5.2.2 Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Kewajiban sebesar Rp 9.148.182,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.3 Ekuitas

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan Ekuitas sebesar Rp 30.021.255.985,95.

5.3 Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 0,00.

5.3.2 Beban-LO

Jumlah Beban-LO tahun 2022 sebesar Rp 15.821.259.905,65 yang terdiri dari Beban Operasi-LO sebesar Rp. 15.821.259.905,65 dan Beban Transfer-LO sebesar Rp 0,00.

5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari Kegiatan Operasional tahun 2022 sebesar Rp (15.821.259.905,65)

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp 27.660.727.772,25 merupakan ekuitas akhir tahun 2021.

5.4.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2022 sebesar (Rp 15.821.259.905,65) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama periode pelaporan tahun 2022.

5.4.3 Ekuitas Mutasi

Ekuitas Mutasi sebesar Rp. 452.162.341,35 terdiri dari Ekuitas Mutasi Aset Tetap Rp 34.996.164,28; Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan Rp. 570.703.178,62 dan Ekuitas Mutasi Aset Lainnya sebesar (153.537.000,55)

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 30.021.255.985,95 merupakan ekuitas akhir tahun 2022.


KEMANTREN SKPD
YOGYAKARTA
SAIWAH FAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP. 19730302192031004

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SKPD : KEMANTREN UMBULHARJO
LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NON APBD / NON RKUD TAHUN 2022**

NO	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SISA
	NIHIL			
	JUMLAH			

*) Contoh:

1. Dana BOS Pusat
2. Dana BOS Provinsi
3. Dana BOK
4. Dana Dekonsentrasi
5. DII



Yogyakarta, 31 Desember 2022
Kepala SKPD

IRRAWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004